

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut BPKAD Kabupaten Brebes (2017) Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari 35 daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah administrasi tercatat sebesar 166.296 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.500 Ha atau 17,65 % dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kersana, luas wilayahnya sebesar 2.523 Ha atau 2,17 % dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam terbagi ke dalam 17 Kecamatan yang terdiri dari 292 desa dan 5 kelurahan, 1.132 Dusun, 1.608 Rukun Warga (RW)/ Lingkungan dan 8.274 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk terakhir yang tercatat pada tahun 2019 adalah sebanyak 1.809.096 jiwa. (BPS ,2019).

Kecamatan dan total	Jumlah Penduduk Kab. Brebes Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	2016	2017	2019
Kabupaten Brebes	1 788 880	1 796 004	1 809 096
Salem	59 706	60 116	60 898
Bantarkawung	89 158	89 322	89 586
Bumiayu	97 980	98 159	98 450
Paguyangan	100 454	101 041	102 151
Sirampog	63 982	64 292	64 869
Tonjong	66 437	66 559	66 756
Larangan	139 771	140 097	140 653
Ketanggungan	137 573	138 045	138 898
Banjarharjo	121 574	122 015	122 817
Losari	122 581	122 805	123 167
Tanjung	95 819	96 407	97 526
Kersana	59 027	59 154	59 363
Bulakamba	169 542	170 530	172 405
Wanasari	149 644	150 996	153 632
Songgom	69 633	69 761	69 968
Jatibarang	85 949	86 365	87 141
Brebes	160 050	160 340	160 816

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes 2016-2019

Sumber : <https://brebeskab.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-kab-brebes-menurut-kecamatan>

Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Berdasarkan Gambar 1.1 mengenai jumlah penduduk Kabupaten Brebes tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, angka ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.788.880 jiwa penduduk. Tingkat laju pertumbuhan penduduk yang tercatat adalah Kabupaten Brebes mengalami penambahan sekitar 242 ribu jiwa atau rata-rata 24 ribu setiap tahun. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2020).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan masyarakat telah mendorong beberapa kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan teknologi informasi yang ada berupa integrasi elemen-elemen kota untuk mendukung kesinambungan kehidupan perkotaan berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *Smart City* (Essabela, 2016 dan Meijer et al., 2016). Penerapan *Smart City* dalam konteks Indonesia setidaknya didukung oleh 3 (tiga) elemen utama, yaitu kapasitas kelembagaan pemerintah, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi (Utomo & Hariadi, 2016). Tujuan dari pengembangan *Smart City* selain untuk mengintegrasikan seluruh elemen kota dalam sebuah sistem teknologi informasi yang mudah diakses oleh semua orang, juga untuk penyediaan pelayanan publik yang transparan, efisien dan adil bagi semua masyarakat (Sudarto, 2006; Utomo & Hariadi, 2016).

Kebutuhan informasi ini telah menjadi salah satu fondasi utama, karena pada dasarnya pemerintah mempunyai tugas serta tanggung jawab terhadap terpenuhinya layanan masyarakat. Kota yang disebut *Smart City* yaitu kota yang mempunyai inovasi baru dalam menyelesaikan permasalahan di kotanya dan berhasil meningkatkan prestasi kotanya dengan penggunaan teknologi dan informasi. Dimensi utama dari *Smart City* yaitu memberi layanan dengan menggunakan teknologi terbaru dan membangun infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberi layanan yang efektif dan efisien terhadap seluruh kalangan masyarakat yang hidup di kota.

Schaffers (2012) mendefinisikan *Smart City* sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. (Kourtit & Nijkamp, 2012) menyatakan *Smart City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan *Smart City* merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal *social* (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal *entrepreneurial* (contohnya aktifitas bisnis kreatif).

Richard Heeks (2006) menjelaskan untuk memahami *e-government*, kita harus memahami IT. Apa yang dilakukan IT: IT menangani data untuk menghasilkan informasi. Langkah selanjutnya untuk memahami *e-government* adalah melihat *e-government* sebagai sistem informasi. Pada intinya pemahaman terletak pada data dan informasi (data telah diproses sehingga berguna bagi penerima). Proses ini yang ditangani oleh teknologi digital, dan terkadang non-digital. Pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ini perlu menganalisis salah satu dimensi pada *Smart City* yaitu dimensi *Smart Governance* untuk dapat mengetahui implementasinya. Untuk melaksanakan program tersebut tentunya diperlukan analisa mendalam mengenai indikator yang membantu perkembangan dan kesuksesan dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Heeks (2006) hampir semua lembaga pemerintahan di dunia ini mengalami ketidakefisienan, terutama di negara yang sedang berkembang. Kota Brebes menjadi salah satu kota yang telah melakukan pengembangan pada bidang teknologi sesuai dengan visi Kabupaten Brebes yaitu “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan berkeadilan. Salah satu bentuk pengaplikasian konsep *Smart City* dalam tataran pemerintahan di Kabupaten Brebes adalah dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi berbasis *e-government* pada pelayanan dan fasilitas

umum. Perkembangan teknologi informasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari, terlebih pada saat ini penguasaan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara (Ngafifi, 2014). Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi informasi terjadi hampir di seluruh aspek, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan kehidupan masyarakat.

Beberapa tahun terakhir ini, terminology *good governance* telah melanda seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok nusantara (Prianto, 2018). *Smart governance* sebagai media perwujudan *good governance* menjadi salah satu unsur terpenting dalam perkotaan yaitu badan / instansi pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi agar dapat di akses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien. Sama seperti fungsi dasar dari pemerintahan yaitu mengelola semua aspek informasi data yang berkaitan dengan perkotaan termasuk didalamnya ada masyarakat, infrastruktur, jaringan, sumberdaya, kebijakan , perekonomian , dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan konsep *smart governance* semua informasi data yang diatas dikonversikan dalam bentuk digital agar dapat di simpan dalam suatu “*database*” yang nantinya dapat diakses oleh yang berkepentingan melalui jaringan *online* dimana saja dan kapan saja.

Sebanyak 50 Kabupaten dan Kota Se-Indonesia serentak menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia. Penandatanganan sebagai bentuk implementasi *Smart City* di berbagai daerah terpilih, termasuk Kabupaten Brebes melalui *zoom meeting* dari Pendopo Bupati Brebes. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G Plate dalam arahannya menyampaikan bahwa sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam upaya mengimplementasikan *Smart City*. Maka Kemenkominfo bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pariwisata, dan Kantor Staf Presiden melaksanakan program Gerakan Menuju *Smart City*.



KABUPATEN BREBES SIAPKAN DIRI MENUJU SMART CITY

Gambar 1.2 Kabupaten Brebes Siapkan Diri Menuju *Smart City*

Sumber : <https://brebeskab.go.id/index.php/content/1/kabupaten-brebes-siapkan-diri-menuju-smart-city>

Dalam upaya ini, Bupati mengapresiasi kepada Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfo) Kabupaten Brebes. Karena telah menyelenggarakan Bintek Penyusunan masterplan *Smart City*. Wakil Bupati Brebes Narjo SH MH, mewakili Pemkab Brebes menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Kominfo. MoU ini bisa sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung pengimplementasian *Smart City* yang sukses dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Brebes. Harapannya, *Smart City* atau kota cerdas pemerintah kabupaten Brebes dapat mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Dengan mengimplemetasikan *e-government* merupakan salah satu prasyarat dalam memudahkan masyarakat dalam mengakses sekaligus melakukan

kontrol terhadap pemerintah mengenai apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan berkaitan dengan pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Bentuk pengembangan sistem dilakukan pemerintah secara *online* berbasis internet serta dalam lingkup *from government to citizen* (G to C). Tujuannya adalah mempercepat dan menyederhanakan akses layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait kebijakan pemerintah.

Smart governance merupakan suatu hal penting yang dibutuhkan dalam pembangunan *Smart City*, alasannya adalah karena *smart governance* merupakan pondasi utama pada *Smart City* maka dari itu perlu di analisis sudah sejauh mana implementasinya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Kabupaten Brebes dalam pengimplementasian *Smart Governance* berdasarkan indikator *e-government*. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dimensi *Smart Governance* berdasarkan indikator *E-Government* di Kabupaten Brebes**”.

1.3 Perumusan Masalah

Smart governance merupakan dimensi pertama dari enam dimensi *Smart City*, Kabupaten Brebes adalah salah satu Kabupaten yang sedang mempersiapkan diri menjadi *Smart City*. Untuk itu kebijakan publik, birokrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang merupakan indikator *smart governance* perlu diukur implementasinya. Pengukuran tersebut perlu dilakukan untuk membantu persiapan Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan *Smart City*. Sehingga dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dijawab, beberapa pertanyaan tersebut diantaranya:

1. Bagaimana implementasi dimensi *smart governance* berdasarkan indikator *e-government* di Kabupaten Brebes ?
2. Apakah program pembangunan di Kabupaten Brebes sudah mengimplementasikan dimensi *smart governance* ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pembangunan dalam pelaksanaan *smart governance* di Kabupaten Brebes ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dimensi *smart governance* berdasarkan indikator *e-government* yang sudah dilakukan oleh Kabupaten brebes dalam pengimplementasian *Smart City*.
2. Untuk mengetahui implementasi program pembangunan di Kabupaten Brebes dari dimensi *smart governance*.
3. Untuk mengetahui apa saja pendukung dan penghambat yang terjadi pada penerapan *smart governance* di Kabupaten Brebes.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya peningkatan efektifitas dan pengoptimalan dalam perwujudan *smart governance* serta memberikan sumbangan pemikiran guna menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam kajian *Good Governance* khususnya pada kebijakan publik, birokrasi pemerintahan, dan pelayanan publik.

1.5.2 Aspek Praktis

- A. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan serta dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan kebijakan publik selanjutnya.
- B. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai penyelenggaraan *Smart Governance*. Di samping itu, penelitian ini dapat berguna sebagai sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kajian dan diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pandangan ilmiah terhadap *Smart Governance*.
- C. Bagi umum, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memberikan sumbangan kepustakaan yang memberikan informasi tambahan bagi

pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

